

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bambang Eko Supriyadi. 2014. *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Effendi Perangin. 2005. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- M. Arba. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ramli Zein. 1995. *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Suhariningsih. 2009. *Tanah Telantar Asas Dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo. 1988. *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Urip Santoso. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Kencana Prenadamedia. Jakarta.
- Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenadamedia. Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*. Kencana Prenada. Jakarta.

Jurnal

- Aghnia Nisya Andini dan Atik Winanti. "Akibat Hukum Hilangnya Hak Milik Atas Tanah yang Ditelantarkan (*Legal Due To Loss Of Ownership Rights To Abandoned Land*)", *National Conference For Law Studies (NCOLS)*. 2020. Hlm. 539-551. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1507> diakses tgl. 13 Oktober 2022

Ahsanul Rizky Ramadhan, Firman Muntaqo, Iza Rumesten RS. “*Penertiban Tanah Telantar dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah*”. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 11, Nomor 1 Mei 2022. Hlm. 92-103.

Fredy Kristyan, Nyoman Serikat Putra Jaya, Irma Cahyaningtyas. “*Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban dan Pemanfaatan Tanah Telantar Kota Semarang*”. Notarius. Vol. 14, Nomor 1 2021. Hlm. 628-640.

Hamdani. “*Penetapan Tanah Hak Guna Usaha Sebagai Objek Tanah Telantar (Studi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat)*”. Swara Justisia. Vol. 6, Nomor 1 April 2022. Hlm. 74-84.

Supriyanto. “*Kriteria Tanah Telantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 10, Nomor 1 Januari 2010. Hlm. 51-59.

Syahyuti. “*Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia*”. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 24 Nomor 1 Juli 2006. Hlm. 14-27.

Nesia Arsyah, Liza Evita Amir Mahmud. “*Penetapan Tanah Telantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan PT. Mojokerto Industrial Park: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2016*”. ADIL: Jurnal Hukum, Vol.12 No.2 Desember 2021. Hlm.96-122

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Skripsi/Tesis

Annissa Sintawati. 2018. *"Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan"*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam. Yogyakarta.

Deny Kharisma Satya Pratama. 2018. *"Analisa Yuridis Sosiologis Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Terhadap Tanah Terindikasi Telantar di Kawasan Perumahan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Malang)"*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Rachmat Abdiansyah. 2015. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Obyek Tanah Telantar Atas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Di Kabupaten Gowa"*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Tri Mahwati. 2020. *"Penertiban Tanah Terindikasi Telantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga"*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Wawancara

Meti Tasi Rombe. Wawancara. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar, 12 Oktober 2022.

Setyabella. Wawancara. Analis Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar. 8 Februari 2021.

Asih Lestari. Wawancara. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Pinrang. 31 Januari 2023.

Yuliati. Wawancara. Koordinator Sub Pengendalian Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Pinrang. 31 Januari 2023.

Internet

Pangjuk Ambok. “*Tanah Telantar Dalam Hukum dan Kemaslahatan*”.
<http://kontekstualita.com>. Diakses tgl 21 Agustus 2022.

Anonim. 2017. “*Kewenangan Menertibkan Tanah Telantar*”.
<https://litigasi.co.id/posts/kewenang-menertibkan-tanah-telantar>.
Diakses tgl 15 Oktober 2022

Anonim. 2021. “*BPN: 1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Telantar*”.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-telantar> (koran
online). Diakses tgl 26 Oktober 2022

Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Tahun 2021. Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id> (dokumen *online*). Diakses tgl 1 Maret 2023

Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Telantar Nomor 3/JUKNIS-700.TL.03.02/II/2022. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id> (dokumen *online*). Diakses tgl 18 April 2023

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 14207/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - 1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulsel
Perihal : izin penelitian 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 573/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ARLISA DITAMI AS**
Nomor Pokok : **B011181415**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN DALAM PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH PANITIA C DI KABUPATEN PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Januari s/d 25 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Nomor: 14207/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampulard hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI/ 20230125876682



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Cendrawasih No. 438, Makassar (90121) Telepon: (0411) 859439 email: sulsel@atr-bpn.go.id

Nomor : UP.02.03/684-73.100/II/2023 Makassar, 09 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
di Tempat

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Nomor 573/UN4.5.1/PT.00/2023 Tanggal 24 Januari 2023 hal Penelitian, dengan ini
disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum atas nama:

Nama : Arlisa DItami AS
Nomor Pokok : B011181415
Judul Skripsi : Identifikasi dan Penelitian Dalam Penertiban Tanah Terlantar oleh
Panitia C di Kabupaten Pinrang

dapat diterima untuk melaksanakan kegiatan penelitian dimaksud,
dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan menaati ketentuan dan tata tertib
yang berlaku pada instansi kami.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Bagian Tata Usaha,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Ir. Hernawati, M.Si.
NIP 196808251994032002

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, di
Makassar.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Jenderal Sukawati No.36 Telp / Fax. (0421) 921013 Pinrang 91212

Pinrang, 01 Februari 2023

Nomor : UP.02.03/434-73.15/II/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Di -

Tempat

Berdasarkan surat Permohonan Penelitian Nomor: 573/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Penelitian untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul "Identifikasi Dan Penelitian Dalam Penertiban Tanah Terlantar Oleh Panitia C Di Kabupaten Pinrang", maka mahasiswa dibawah ini :

Nama : Arlisa Ditami AS
No.Pokok : B011181415
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyetujui mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian yang dilaksanakan dari tanggal 25 Januari sampai dengan 25 April 2023.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PINRANG**

Ditanda tangani Secara
Elektronik

**ASIH LESTARI, S.H.,M.Kn
NIP. 19810106 200502 2 002**



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur "Validasi Surat" pada aplikasi Semah Tanahku

Melayani Profesional Terpercaya